

HARIAN  
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK  
01 MARET 2011

PENDIRI:  
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA  
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

# Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Selasa

03 Desember 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

## Peran Vital PDAM Baubau Pastikan Akses Bersih Merata, Dr Muh Rasman Manafi: PDAM Harus ke Daerah-Daerah Yang Belum Terjangkau



Laporan: Amat Jr, Baubau Post, Durasi Times

*BAUBAU, BP-Air adalah sumber kehidupan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, penyediaan air bersih yang aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tugas yang sangat mulia dan strategis. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah daerah, memiliki peran vital dalam memastikan akses air bersih yang merata di seluruh wilayah khususnya Kota Baubau.*

Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat memberikan sambutan pada kegiatan Tata kelola PDAM

Lanjutkan ke Hal: 7

## Pj Bupati Buteng Kostantinus Bukide Jadi Irup Peringatan Hari Guru Nasional ke 79



Laporan: Rahim

Buteng, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN)

dan HUT ke-79 PGRI di halaman kantor Bupati lama, Lakudo, pada Senin (25/11/2024). Kegiatan ini dihadiri ratusan guru.

Lanjutkan ke Hal: 7

## Dr H Muh Rasman Usulkan Kota Baubau Menjadi Kota Buton

Laporan: Ardi



BAUBAU, BP-Negeri Buton adalah negeri yang sangat tua, berbagai tata nilai terus diupayakan untuk dapat diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah, dan salah satu tata nilai yakni identitas yang diharapkan

Lanjutkan ke Hal: 7

Pj walikota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi

## Mewakili Pj Gubernur, Sekda Sultra Buka secara Resmi Pembinaan Penyedia E-Katalog Lokal Lingkup Pemprov Sultras



Laporan: Ardi

KENDARI, BP- Mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi

Revianto.,S.I.K.,M.H, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D membuka secara resmi

Lanjutkan ke Hal: 7

Dr. H. MUH. RASMAN MANAFI, SP, M.Si  
Pj. Wali Kota Baubau

LA ODE ASWAD, S.Sos.,M.Si | Dr. MOHAMMAD TASHIK, S.H.,M.Si  
Pj. Sekda Kota Baubau | Kadispora Kota Baubau

**FESTIVAL OLAKHRAGA TRADISIONAL (FORTRAD) TINGKAT KOTA BAUBAU 2024**  
Baubau, 29 November s.d 3 Desember 2024  
Ayo Berolahraga - Bersatu Kita Juara



Andina Latief, SKM  
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA  
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



## Peran Vital PDAM Baubau Pastikan Akses Bersih Merata, Dr Muh Rasman Manafi: PDAM harus ke daerah-daerah yang belum terjangkau

Tirta Semerbak Kamis (28/11/2024).

Menurut Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, PDAM Kota Baubau sesuai data per 31 Desember 2023 memiliki kontribusi PAD sebesar Rp 50 Juta dan kontribusi pajak sebesar Rp 120 778 000 dengan jumlah pelanggan sebanyak 18.369 yang terdiri atas pelanggan aktif 14.343 keluarga dan pelanggan non aktif sebanyak 4.026 keluarga. Sedangkan, status nilai kinerja PDAM Tirta Semerbak masih tergolong kedalam kategori kurang sehat.

Oleh sebab itu, melihat kondisi seperti ini, PDAM memiliki tanggung jawab be-

sar untuk meningkatkan pelayanan secara terus-menerus, baik dari segi distribusi, kualitas, maupun harga yang wajar bagi pelanggan. dengan kemajuan teknologi dan manajemen yang tepat, PDAM harus ke daerah-daerah yang belum terjangkau.

Dikatakan, tata kelola yang baik adalah landasan utama untuk memastikan bahwa PDAM dapat menjalankan operasionalnya dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memiliki kebijakan dan mekanisme

yang jelas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan operasional yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, manajemen risiko merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan usaha PDAM. Setiap PDAM dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang datang dari faktor eksternal maupun internal. Tanpa adanya identifikasi, mitigasi, dan pemantauan risiko yang sistematis, PDAM akan rentan terhadap masalah yang dapat mengganggu kinerja dan pelayanan. oleh karena itu, workshop ini sangat penting untuk memperdalam pemahaman

kita dalam mengelola dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Kemudian, tidak kalah pentingnya, pengendalian internal yang efektif dan baik akan memastikan bahwa seluruh proses operasional, baik dalam hal keuangan, sumber daya manusia, maupun pelayanan kepada masyarakat, dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan. Pengendalian internal yang lemah bisa menimbulkan penyimpangan, korupsi, dan bahkan kerugian yang dapat merugikan masyarakat banyak. (\*)

## Mewakili Pj Gubernur, Sekda Sultra Buka secara Resmi Pembinaan Penyedia E-Katalog Lokal Lingkup Pemprov Sultras

kegiatan pembinaan penyedia e-katalog lokal lingkup Pemprov Sultra, Kamis (21/11/2024), di Kendari.

Menurut Pj Gubernur yang diungkapkan melalui Sekda Sultra, salah satu isu penting menjadi visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif.

Dia mengatakan, untuk merealisasikan cita-cita tersebut, maka perlu kolaborasi dan sinergitas yang diiringi dengan semangat terus berbenah serta meningkatkan kemampuan dari seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tentang percepatan peningkatan penggunaan PDN dan UMKK dan mendukung Asta Cita pada aspek pengadaan barang dan jasa, Pemprov Sultra segera menyiapkan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya konkret untuk mewujudkan visi misi tersebut, dia menjabarkan,

langkah-langkah strategis dan upaya konkret tersebut yakni:

1. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog lokal.

Artinya, kedepan semua proses pemilihan akan didorong untuk menggunakan katalog elektronik local, termasuk pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, pelaku usaha sedapat mungkin segera membuat akun dan menayangkan produknya pada katalog local, sesuai dengan etalase yang tersedia.

Selain e-katalog lokal, pelaku UMK juga dapat menayangkan produknya di aplikasi bosara (belanja online sulawesi tenggara).

2. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah/artisan pada semua kontrak kerja sama.

Seyogyanya, kewajiban penggunaan produk dalam negeri sudah harus ditetapkan pada saat PPK melakukan perencanaan. Ketika identi-

fikasi kebutuhan dilakukan, PPK sudah merencanakan target tingkat komponen dalam negeri terhadap barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.

Target ini menjadi acuan dan menjadi salah satu syarat pejabat pengadaan atau pokja pemilihan untuk melakukan proses pemilihan penyedia.

Jadi, PPK harus menghitung nilai TKDN dari setiap paket pekerjaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi yang akan diadakan. Jika terdapat kendala dalam penghitungan nilai TKDN, maka dapat berkonsultasi di Biro Pengadaan.

3. Mengalihkan seluruh proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik.

Hal ini untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk transparansi dan akuntabilitas, memudahkan monitoring dan evaluasi, serta memudahkan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Harapan kita, dengan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan ba-

rang dan jasa pemerintah, maka akan mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dan produk usaha kecil, menengah dan koperasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, katanya.

Dia pun berharap, pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan dan tambahan pengetahuan untuk menjadi lebih baik dan berintegritas.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua peserta, agar dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berintegritas, pesannya.

Turut hadir, Direktur Pasar Digital LKPP RI, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sultra, atau masing-masing yang mewakili, termasuk berbagai pihak terkait lainnya. (\*)

## Pj Bupati Buteng Kostantinus Bukide Jadi Irup Peringatan Hari Guru Nasional ke 79

san guru dari berbagai sekolah di Buton Tengah.

Upacara di pimpin langsung oleh Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide dihadiri oleh Ketua DPRD Buteng, Sa'al Musrimin Haadi, Wakapolres Buteng, yang mewakili Dandim 1413 Buton, para pejabat eselon II, III, IV dan staf lingkup Pemkab Buteng.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Buteng membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Tema Hari Guru Nasional 2024, "Guru Hebat, Indonesia Kuat", ditegaskan memiliki tiga makna utama.

Pertama, peringatan ini menegaskan pentingnya kedudukan guru sebagai pendidik profesional yang tidak hanya menga-

jar, tetapi juga mengedukasi, membimbing, dan menilai hasil belajar siswa.

Kedua, guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran tetapi juga agen peradaban, mencetak generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan berkepribadian mulia.

Ketiga, guru menjadi penentu kualitas SDM yang memajukan bangsa.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen meningkatkan kualitas guru melalui tiga program prioritas. Pertama, pemenuhan kualifikasi guru dengan memastikan ratusan ribu guru memiliki pendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1. Kedua, peningkatan kompetensi guru yang mencakup aspek akademik, peda-

gogik, moral, sosial, serta kewirausahaan dan kepemimpinan melalui pelatihan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, baik untuk guru ASN maupun non ASN.

"Dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan ini, diharapkan para guru semakin bersemangat mendidik generasi penerus bangsa", ujar Pj Bupati dalam sambutannya.

Di akhir sambutannya, Pj Bupati Kostantinus Bukide menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh pendidik di Buton Tengah.

"Selamat Hari Guru Nasional 2024. Guru Hebat, Indonesia Kuat", tutupnya. (\*)

## Dr H Muh Rasman Usulkan Kota Baubau Menjadi Kota Buton

dapat disempurnakan dalam kebijakan pejabat pemerintah daerah. Hal yang sangat spesifik dalam identitas itu adalah mengembalikan nama Kota Baubau menjadi Kota Buton yang diharapkan mendapat sambutan baik di pemerintahan selanjutnya.

Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat memberikan sambutan pada pelaksanaan acara Bulilingiana Pau (Pelantikan) Sultan Buton atau Laki Wolio di baruga Keraton Buton Jumat (29/11/2024).

Menurut Dr H Muh Rasman, usulan perubahan nama Kota Baubau menjadi Kota Buton sebagai aspirasi generasi Buton atas kerinduan narasi Kerajaan Buton yang tertuang dalam berbagai naskah sampai ke Leiden Belanda yang sangat mengenal wilayah yang namanya Buton atau Butuni. Sehingga pihaknya sangat mengharapkan Kota Baubau ini dapat dikembalikan marwahnya menjadi Kota Buton yang beribukota di Baubau karena ini adalah identitas.

Kemudian, bahwa nilai-nilai kewilayahan, nilai-nilai sosial telah banyak dilihat dan

salah satu nilai kewilayahan yang menjadi kebanggaan yang saat ini sudah mulai hilang adalah identitas wilayah itu sendiri. Yang kalau wilayah itu dibagi dalam RT dan RW dengan angka 1, 2, dan 3. Sementara negeri ini bukan negeri yang baru dibuka. Negeri ini sudah memiliki nilai kewilayahan, identitas kewilayahan. Kita sudah kenal ada namanya wilayah, seperti misalnya Pimpi dan yang lainnya. Saya sangat berharap lewat lembaga adat dan Kesultanan Buton ini untuk dapat diinisiasi kembali untuk kita kembalikan nilai-nilai wilayah itu. Ini sangat berarti menurut pandangan saya, karena semua rencana tata ruang wilayah baik nasional maupun kabupaten kota, apalagi di tata ruang laut, nilai-nilai itu telah ada di wilayah kita. Mari kita kembalikan itu, karena itu adalah kebanggaan sekaligus dan ini adalah doktrin sebagai anak negeri Butuni, ujarnya.

Ditambahkan, Buton terbangun, berdiri, bukan karena satu suku atau satu kelompok atau satu keluarga. Oleh sebab itu, Sultan-nya itu tidak pernah turunan dan pasti dipilih, karena dia berasal dari lebih dari satu kelompok atau satu keluarga. Negeri ini juga telah mempraktekkan demokrasinya yang sangat tua. Sehingga perbedaan yang ada bagi generasi Buton, tentu itu adalah keragaman yang patut dilestarikan dan dijaga. Tetapi sebagai orang tua negeri, orang tua adat, pasti akan terus berupaya supaya arahnya sama.

Tinggalkan kepentingan pribadi, tinggalkan nafsu kelompok. Bolimo Karo Somanamo lipu. Kalau, saya ulangi, untuk menyatukan itu kita sudah meninggalkan kemauan pribadi dan kelompok dan mengedepankan negeri, namun masih ada aturan negeri yang ternyata harus kita perbaiki, maka Bolimo Lipu Somanamo Sara. Sehingga, pada titik tertinggi yakni Bolimo Sara Somanamo Agama. Kalau keberagaman kita, perbedaan kita sangat sulit dipersatukan karena kita berbeda sara, berbeda garis darah pun, tetapi demi kita tegakkan syariat agama kita, maka tidak ada kata lain, kita harus bersatu, bersatu, bersatu. Hai anak negeri Butuni semua perjalanan yang ada telah terukir diingatan kolektif kita. Bolimo Karo Somanamo Lipu. Adat tegak negeri beradab, tegasnya. (\*)

## Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Sultra Periode 2024-2029, Pj Gubernur : Tingkatkan Sinergisitas Dan Kolaborasi Untuk Bangun Sulawesi Tenggara



### Laporan: Masuri

SULTRA, BP- Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menghadiri acara pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD Provinsi Sultra untuk masa bakti 2024-2029, Senin (25/11/2024).

Mendasari Surat Keputusan Mendagri No. 100.2.1.4-4782 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Sultra, Sdr La Ode Tariale resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Sultra bersama para Wakil Ketua DPRD yakni Sdr La Ode Frebi Rifai, Herry Asiku, dan Sdr Hasmawati.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur mengucapkan selamat kepada Pimpinan DPRD yang baru saja diambil sumpah janjinya.

“Selamat kepada Ketua dan para Wakil Ketua DPRD untuk periode 2024-2029 yang baru saja diambil sumpah janjinya. Semoga amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi,” ujar Andap.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD memiliki peran vital sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengawal aspirasi masyarakat.

“DPRD adalah garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional rakyat, dan saya yakin kepemimpinan yang baru ini dapat membawa perubahan yang semakin signifikan dan positif,” lanjutnya.

Pj. Gubernur juga mengajak seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memperkuat sinergisitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra.

“Sinergisitas dan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban oleh Pimpinan DPRD merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat, sebagai ladang ibadah dan pengabdian.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur menyoroti pentingnya kontribusi DPRD dalam mendukung pamban-

gunan daerah di berbagai bidang.

“Saya berharap DPRD Provinsi dapat berperan secara aktif dalam politik legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga program-program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik serta sesuai harapan rakyat dan memberikan manfaat nyata,” katanya.

Selain itu, Pj. Gubernur juga mengapresiasi langkah maju yang telah diambil Sultra sebagai pelopor di tingkat nasional dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Perda No. 3 Tahun 2024 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Presisi, Pj. Gubernur menekankan dengan Perda ini, pembangunan daerah dapat dipastikan lebih terencana, terukur dan tepat sasaran.

Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi Perda ini memerlukan komitmen dan kerja keras. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dalam memastikan pembangunan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi rakyat Sulawesi

Tenggara.

Usai acara, dalam kesempatannya ketika dimintai keterangan oleh awak media, Pj. Gubernur menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan DPRD yang baru.

“Saya yakin Pimpinan DPRD Provinsi yang baru dilantik memiliki kapasitas dan integritas untuk melaksanakan amanah ini dengan baik. Kita semua punya tugas bersama untuk membangun Sulawesi Tenggara yang semakin maju, sejahtera, dan modern,” ujar Andap.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Provinsi akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Kita harus solid, berorientasi pada solusi, dan yang terpenting, bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi, Forkopimda Tingkat 1 Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Pimpinan K/L yang berada di Sultra serta Pimti Pratama Tk. I Pemprov Sultra dan berbagai Tokoh Masyarakat. (\*)

## Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi Sultra Periode 2024-2029



### Laporan: Listar

SULTRA, BP-Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, menghadiri dan memberikan sambutan dalam rapat paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2024-2029. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 25 November 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kendari.

Turut hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Sultra, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah, para anggota fraksi-fraksi DPRD Sultra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada para Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru saja diambil sumpah/janjinya. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan demi mengemban aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Pj. Gubernur menjelaskan bahwa DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Politik Legislasi,
2. Politik Anggaran, dan
3. Politik Pengawasan.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk memperkuat sinergi dengan jajaran eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, Pj. Gubernur mengapresiasi kolaborasi eksekutif dan legislatif yang telah menghasilkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Perda ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai

provinsi pertama di Indonesia yang memprioritaskan kebijakan berbasis data presisi.

“Dengan Perda ini, kita memastikan pembangunan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran, demi kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Kemudian, dalam rangka mendukung visi pembangunan Sulawesi Tenggara 2025-2045, yakni “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan”, Pj. Gubernur menekankan pentingnya perhatian terhadap isu-isu strategis, seperti pemenuhan hak konstitusional masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara., La Ode Tariale, menyampaikan bahwa pengambilan sumpah/janji ini merupakan langkah awal bagi DPRD untuk menjalankan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah demi mewujudkan kebijakan yang harmonis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD juga mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini, khususnya Sekretariat DPRD, yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia mengingatkan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk agenda strategis di penghujung tahun 2024.

Melalui acara ini, diharapkan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029 dapat membawa perubahan yang lebih baik, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. (\*)

## Sekda Prov. Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah



**Pewarta: Mashuri**

SULTRA, BP-emerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah bagi rakyat Indonesia tahun 2024. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta. Dalam kegiatan ini, hadir pula Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputy III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Nita Yulianis dari Badan Pan-

gan Nasional, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, serta Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri.

Di tingkat daerah, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten II Setda Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BI, Bulog, Karantina, BPS Sultra, dan dinas terkait lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakor pengendalian inflasi merupakan amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah kondisi global yang dinamis.

"Rakor ini harus terus dilanjutkan karena sangat membantu menjaga ang-

garan Nasional, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, serta Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri. Di tingkat daerah, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten II Setda Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BI, Bulog, Karantina, BPS Sultra, dan dinas terkait lainnya.

Tito menambahkan bahwa faktor global, seperti eskalasi konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan hasil pemilu di Amerika Serikat, turut memengaruhi dinamika pasokan dan permintaan global yang berimbas pada inflasi di Indonesia.

Sementara itu, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di November 2024. Data menunjukkan Kabupaten Buton Utara di Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,06%, dengan komoditas penyumbang utama seperti daging ayam

ras, cabai rawit, dan ikan kembung.

Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bentuk-bentuk cepat berpuas diri. Presiden Prabowo menargetkan inflasi turun di bawah 4%. Beberapa komoditas seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng membutuhkan perhatian khusus.

"Kepala daerah harus memastikan koordinasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan, untuk memantau harga dan memperkuat stok jika terjadi kekurangan. Jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat," tegas Tito.

Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan ini juga menyosialisasikan kebijakan penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia di tahun 2024, sebagai upaya mendukung program strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan papan masyarakat. (\*)

program kegiatan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tetapi harus juga didukung dengan tertib administrasi yang baik.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya ditempuh adalah dengan melakukan pengendalian yang intens terhadap program kegiatan dilaksanakan secara internal, mulai dari sekda selaku pengguna anggaran atau PA, kemudian kepala biro sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA, PPK, PPTK, pokja atau pejabat pengadaan, hingga para kepala bagian maupun koordinator pada masing-masing biro," terangnya.

Sekda Sultra, Asrun Lio juga menekankan bahwa aktivitas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tidak hanya terbatas dalam bentuk rapat, melainkan dalam bentuk-bentuk lainnya seperti konsultasi, koordinasi, surat menyurat dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

"Melalui upaya pengendalian secara sistematis tersebut, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan tercapai dengan baik sebagai bagian dari wujudan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik dan prima kepada masyarakat," pesannya.

Sekda Sultra kembali mengingatkan, untuk bersama-sama tumbuhkan komitmen membangun, baik selaku pemerintah maupun dengan pihak-pihak terkait, untuk secara proaktif mewujudkan percepatan penyerapan anggaran optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bersih, berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

Sebelumnya, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sultra telah melakukan rapat evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah semester II Tahun Anggaran 2024, yang melibatkan seluruh Biro Lingkup Setda Provinsi Sultra, Senin (18/11/2024), di Kendari.

Dalam kesempatan itu, mewakili Sekda Sultra, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Sultra, Laode Fasikin mengatakan, melalui

kesempatan rapat evaluasi capaian kinerja program maupun kegiatan semester II tersebut, telah dilakukan penyampaian-penyampaian penting kepada masing-masing biro.

"Semua kepala biro harus dapat melaksanakan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan dan seluruh kegiatan di lingkup bironya yang lebih optimal, sehingga seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu dengan kualitas hasil yang memuaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Fasikin mengatakan, menggunakan sebaik-baiknya sisa hari atau waktu yang ada, agar bisa melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan realisasi fisik dan keuangan dari anggaran yang dimiliki, mengingat saat ini telah memasuki triwulan IV atau akhir semester II tahun 2024.

"Melakukan evaluasi terhadap semua program kegiatan di tahun anggaran 2024, dalam rangka menginventarisir kendala yang ada pada masing-masing biro, kemudian mencari solusi terbaik untuk penyelesaian kendala tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Sultra, LM Martosiswoyo SE MSi mengatakan, pelaksanaan DPA APBD pada Biro lingkup Setda Provinsi Sultra yang merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun sampai dengan pertengahan November 2024 atau akhir semester II, terus menunjukkan adanya aktivitas penyerapan.

"Melalui rapat ini, kita dapat melakukan sinergi dan koordinasi termasuk mengetahui kendala atau persoalan dihadapi untuk mencari solusi bersama, serta menjadi rujukan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya," ujarnya.

LM Martosiswoyo menambahkan, rapat evaluasi itu juga dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara/Bendahara Pembantu dan Pejabat Pengadaan, sebagai upaya mendorong percepatan realisasi atau penyerapan APBD Tahun Anggaran 2024 Biro lingkup Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua Panitia Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Biro Lingkup Setda Provinsi Sultra Semester II Tahun Anggaran 2024, Yakop Udi SE MSi mengatakan dasar hukum kegiatan tersebut, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Selanjutnya, kata dia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kemudian, lanjutnya, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sultra Nomor 19 tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sultra Nomor 43 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sultra.

Dia menerangkan, adapun maksud dan tujuannya, pertama untuk meningkatkan efektivitas program atau kegiatan Biro Lingkup Setda Provinsi Sultra, agar dapat menyelesaikan program dan kegiatan secara tepat waktu dengan tingkat capaian realisasi anggaran yang baik, berdasarkan Rencana Alur Kas (RAK) yang telah disusun.

Kedua, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga capaian hasil pembangunan tepat dinikmati secara cepat oleh masyarakat.

Ketiga, untuk meningkatkan kredibilitas pemerintahan, dan meningkatkan realisasi anggaran.

Turut hadir, para Staf Ahli Gubernur Sultra, para Asisten Sekda Provinsi Sultra, para Kepala Biro lingkup Setda Provinsi Sultra atau masing-masing yang mewakili, para Kepala Bagian maupun Fungsional Madya dan Kasubag, Fungsional Muda lingkup Setda Provinsi Sultra, dan sejumlah pihak terkait lainnya. (\*)

## Biro Pembangunan Evaluasi Capaian, Sekda Sultra Target Hasil Kerja Memuaskan pada Penghujung Waktu Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024

KENDARI, BP-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio., M. Hum., Ph.D mengajak seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Sultra, khususnya lingkup Sekretariat Daerah, untuk dapat mencapai target hasil kerja memuaskan pada penghujung waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, Min-

nggu (24/11/2024), di Kendari.

"Sebelumnya, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sultra telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program maupun kegiatan semester II Tahun 2024, untuk seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah Pemprov Sultra. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana

progres capaian kita," tuturnya.

Sekda Sultra, Asrun Lio mengatakan, dalam rapat evaluasi itu juga diharapkan adanya sinergitas satu sama lain, dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

"Tentunya, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik serta semangat kerja tinggi,

semoga kita dapat mencapai hasil kerja yang memuaskan di masa penghujung waktu pelaksanaan tahun anggaran 2024 yang menyalakan waktu efektif kurang lebih sekitar 20 hari lagi," ucapnya.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini kembali mengingatkan, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD yang baik, bukan hanya dibutuhkan pelaksanaan

## Jaga Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, TPID Baubau Sidak Pasar Tradisional

BAUBAU, BP- Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Baubau dipimpin Sekretaris TPID Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si bersama Kadis Perindag La Ode Ali Hasan SE, M.Si, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Muh Rais, SP, Kabulog Baubau, Kabag Pembangunan Setda Kota Baubau Safrin, S.Par, perwakilan Posal Baubau melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) berbagai kebutuhan pokok di Pasar Wameo, distributor beras, gudang bulog dan pasar modern hypermart Jumat (22/11/2024).

Menurut Dra Hj Asmahani, setelah mengecek di pasar wameo, ada beberapa jenis bahan kebutuhan pokok yang terpantau dan ternyata masih stabil termasuk juga harga beras yang coba dilacak langsung ke beberapa distributor dan juga ke Bulog



Pemkot Baubau melalui TPID pantau sejumlah pasar tradisional di Kota Baubau dalam rangka menjaga inflasi menjelang perayaan natal dan tahun baru 2025

Baubau juga masih stabil dengan stok yang cukup banyak dan memadai bahkan sampai di tahun 2025. Termasuk di pasar modern harga masih terjangkau.

“Jadi kita melakukan pemantauan di beberapa titik-titik di pasar, distributor, di

bulog terakhir di pasar modern membandingkan harga-harga dan sampai sekarang ini harga-harga ini tidak ada perubahan dari beberapa bulan yang lalu. Harga-harga itu ada yang cenderung turun, kemudian dalam rangka menghadapi tahun

baru yang mendasar hari ini persiapan pilkada sangat besar sekali kebutuhan masyarakat itulah yang coba kita antisipasi bagaimana kebutuhan pokok itu bisa terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan, kemudiam dalam proses persiapan makanan gratis yang menurut informasi hampir semua wilayah Kep-ton ini belanjanya di Baubau. Sehingga itulah yang dipersiapkan bagaimana antisipasinya, dan akan terus dipantau stok-

stok yang berada di pasar-pasar terutama kebutuhan pokok ayam, telur, minyak goreng dan lain-lain. Sedangkan yang tertonton dengan siswa makan gratis ini, akan dipersiapkan betul-betul apapun yang mau diupayakan dan memasti-

kan Baubau tidak akan ada kenaikan harga.

Sementara itu, Kabulog Baubau mengungkapkan, untuk ketersediaan stok beras di Bulog Baubau kurang lebih ada 2600 ton itu sampai di awal tahun 2025 sudah siap. Dan jika melihat hasil Sidak di pasar untuk beras harganya lebih stabil karena Bulog Baubau juga memperluas jangkauan untuk beras jenis SPHP. Sebab memang jenis SPHP ini guna melaksanakan program pemerintah bisa menurunkan harga beras di Kota Baubau.

Ditempat yang sama, store manager Hypermart Agung Nurmaulana menjelaskan, menghadapi persiapan Nataru 2025, untuk kebutuhan customer pihaknya bisa terpenuhi dan untuk ayam sendiri ada stok 7 ton dan untuk ayam pcs an untuk ukuran 0-900 gr kurang lebih ada 3½ ton. (\*)

## Pemkot Baubau Sinkron dengan Provinsi Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Tiga Juta Rumah

Pemkot Baubau dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah bagi rakyat Indonesia tahun 2024. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta. Dalam kegiatan ini, hadir pula Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy



Priyono, Nita Yulianis dari Badan Pangan Nasional, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, serta Dirjen Hortikultura Kementerian Andi Muhammad Idil Fitri.

Di tingkat daerah, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,

Asisten II Setda Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BI, Bulog, Karantina, BPS Sultra, dan dinas terkait lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakor

pengendalian inflasi merupakan amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah kondisi global yang dinamis.

“Rakor ini harus terus dilanjutkan karena sangat membantu menjaga angka inflasi Indonesia. Pada bulan lalu, in-

flasi berada di angka 1,7% year-on-year. Meski ada kenaikan month-to-month sebesar 0,08%, situasi ini masih cukup terkendali,” jelas Mendagri.

Tito menambahkan bahwa faktor global, seperti eskalasi konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan hasil pemilu di Ameri-

ka Serikat, turut memengaruhi dinamika pasokan dan permintaan global yang berimbas pada inflasi di Indonesia.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di November 2024. Data menunjukkan Kabupaten Buton Utara di Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,06%, dengan komoditas penyumbang utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan ikan kembung.

Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Presiden Prabowo menargetkan inflasi turun di bawah 4%. Beberapa komoditas seperti beras, gula pasir, dan min-

yak goreng membutuhkan perhatian khusus.

“Kepala daerah harus memastikan koordinasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan, untuk memantau harga dan memperkuat stok jika terjadi kekurangan. Jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat,” tegas Tito.

Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan ini juga menyosialisasikan kebijakan penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia di tahun 2024, sebagai upaya mendukung program strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan papan masyarakat. (\*)

## Dukung Asta Cita Presiden RI Bidang Kesehatan, Pj. Gubernur Melalui Sekda Sultra Buka secara Resmi Fokus Group Discussion Kepala Puskesmas se-Sultra

SULTRA, BP-Mendukung Asta Cita Presiden RI Bidang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kesehatan, diantaranya melakukan inisiasi fokus group discussion Kepala Puskesmas se-Sultra, Kamis (21/11/2024), di Kendari, yang dibuka secara resmi oleh Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio., M. Hum., Ph.D mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H.

"Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang baru pertama kali terlaksana. Pertemuan ini sangat penting dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Bidang Kesehatan, serta menyukseskan terlaksananya enam Pilar Transformasi Kesehatan di Tingkat Puskesmas," ucapnya mengawali sambutan.

Sekda Sultra, Asrun Lio menengahkan, enam pilar tersebut yakni Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

"Sebagaimana kita ketahui, tugas dan fungsi Kepala Puskesmas adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan Pelayanan Kesehatan, yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat," katanya lagi.

Termasuk, masih dia, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung di Pustu dan di Puskesmas.

"Saya sangat mengharapkan tugas, fungsi dan tanggung jawab kepala puskesmas betul-betul sebagai Penggerak Pembangunan Kesehatan di Tingkat Kecamatan dan sebagai tenaga ahli pendamping Camat dan Lintas Sektoral, dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya," harapnya.

Jenderal ASN Provinsi Sultra menjelaskan, Puskesmas di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkembangannya dari tahun ketahun, terus menunjukkan peningkatan, baik itu dari segi jumlah maupun status.

Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, kepulauan dan perbatasan.

"Sampai dengan Oktober 2024 ini, jumlah puskesmas di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai 308 puskesmas yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Salah satu indikator untuk menggambarkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan primer oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar adalah rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk, dimana Rasio Puskesmas per 30.000

penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 sebesar 3.34 yang berarti setiap 30.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara dilayani setidaknya oleh 3 (tiga) Puskesmas," terangnya.

Bila dilihat berdasarkan angka, katanya lagi, maka rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dapat dianggap cukup, namun demikian menghitung rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk tidak selalu relevan dengan kondisi di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena wilayah yang luas, penduduk yang tersebar tidak merata, dan kondisi geografis yang sebagian relatif sulit.

Sehingga, masih dia, akan lebih tepat bila menggunakan rasio Puskesmas berdasarkan kecamatan yakni 1 (satu) kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas. Jika menggunakan acuan ini maka dengan 308 Puskesmas berbanding 231 kecamatan diperoleh rasio 1,33.

"Artinya, setiap kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah terdapat minimal 1 (satu) Puskesmas, dan bahkan di beberapa kecamatan tertentu telah memiliki 2 (dua) puskesmas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas yang menyatakan bahwa 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) puskesmas," tuturnya.

Sekda Sultra, Asrun Lio mengakui, jika Puskesmas sebagai salah satu ujung tombak pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah, memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Untuk itu menurutnya, perlu adanya wadah yang menyatukan visi dan misi serta sinerginya pelayanan kesehatan di FKTP, terutama pelayanan kesehatan pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, agar tidak lagi menjadi polemik dalam memberikan pelayanan kesehatan secara tepat dan cepat, terutama bagi pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional.

"Saya sangat mengharapkan pada forum diskusi ini, dapat disepakati bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu cepat dan tepat, tidak ada lagi kejadian pasien yang terlambat ditangani, pasien ditolak dan lain sebagainya, hanya karena alur sistem administrasi yang kadang dianggap berbelit-belit oleh masyarakat," katanya lagi.

Melalui kesempatan itu pula, Sekda Sultra, Asrun Lio berharap, agar para Kepala Puskesmas yang hadir, dapat menjadi Penggerak Pembangunan Kesehatan di Tingkat Kecamatan, terutama dalam implementasi 6 (enam) pilar transformasi kesehatan, sehingga dapat terlaksana dengan baik khususnya pada pilar pertama yakni bagaimana sistem transformasi layanan primer melalui kegiatan edukasi, pencegahan primer, dan pencegahan sekunder.

"Termasuk bagaimana meningkatkan, untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien, dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas dan mengurangi disparitas derajat kesehatan antar wilayah," harapnya lagi.

Pada forum itu juga, dia mengharapkan peran aktif para Kepala Puskesmas untuk memberikan masukan, saran perbaikan

pelayanan kesehatan kedepannya, baik dari segi ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan jenis hingga kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas maupun di puskesmas pembantu.

Dalam kesempatan itu juga, Sekda Sultra menyampaikan selamat datang kepada para Narasumber dari Pusat Kementerian Kesehatan RI, termasuk kepada para narasumber dari lintas sector.

"Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan yang sangat bermanfaat ini," ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Sultra, Asrun Lio menyampaikan pantun.

"Mencari buah di dalam kulkas. Yang ada hanya si buah talas. Menjadi nakes profesional dalam bertugas."

Melayani pasien dengan hati yg ikhlas," ucapnya Ke sawah lihat petani. Petani sedang menanam padi. Merawat pasien dengan hati. Bukan dengan hati yang tersakiti," tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI selaku Pembina

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran, Kepala BPJS Cabang Kendari, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, para Kepala Puskesmas se Sultra, dan sejumlah pihak terkait lainnya. (\*)



## PEMERINTAH KOTA BAUBAU MENGUCAPKAN



## SELAMAT MERAYAKAN NATAL DAN TAHUN BARU 2025



**Dr. H. MUH. RASMAN MANAFI, S.P., M.Si**  
Pj. Walikota Baubau

**Ny. REFFIANI DWIATMO RASMAN, S.T**  
Ketua TP PKK Baubau

**LA ODE ASWAD, S.Sos, M.Si**  
Pj Sekda Kota Baubau

**H. ANDI HAMZAH MACHMUD, S.Sos, M.Si**  
Kadis Kominfo Baubau

**Baubau Post**

**Kritik, Lugas, Independen**

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

**Pemimpin Umum :** Fauzan NWA  
**Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi :** Ardi  
**Redpel :** Hengky TA  
**Korlip :** Hengky T.A  
**Redaktur :** Alyakin, Kasrun  
**Reporter :** Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna

**Layouter :** Rlirin  
**Pracetak :** Aditya  
**Cetak :** Jamal

**Penerbit :** PT. Faren Grafika  
**Komisaris :** Erna Agule  
**Direktur Utama :** Andina Latief, SKM  
**Manager Keuangan :** Nabila D.A  
**Manager Iklan dan Pemasaran :** Fauzan  
**Kepala Sirkulasi :** Jamal  
**Administrasi :** Salvana  
**Security :**

**Kepala Biro Wakatobi :** Risman  
**Kepala Biro Buton Utara :** Fauzan  
**Kepala Biro Buton :** Rahman  
**Kepala Biro Busel :** Salvana  
**Kepala Biro Buteng :** Andini  
**Kepala Biro Bombana :**  
**Kepala Biro Sultra :**

**Kontributor Baubau :** Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr  
**Kontributor Buton :** Kontributor Butur : Kasrun,  
**Kontributor Buteng :** Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

**Baubau :** Jaya  
**Agen Pasarwajo :**  
**Agen Butur :** Samrihan

**Harga Langganan :** Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,  
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,  
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau  
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com  
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu,  
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

## PDIP Akan Kawal Connie Diperiksa Polisi Besok: Diduga Kriminalisasi



PDIP klaim Connie dipanggil Polda Metro Jaya besok, Senin (2/12).

JAKARTA- DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan akan memberi pendampingan hukum kepada akademisi Connie Rahakundini Bakrie, yang dipanggil oleh Polda Metro pada Selasa (2/12) besok.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan pihaknya telah mendengar Connie akan dipanggil terkait kasus Maret 2024 lalu.

"Kami mendapatkan berita dari Mbak Connie bahwa Mbak Connie ini tanggal 2 Desember besok akan dipanggil oleh Ke Polda Metro Jaya. Beritanya ini kasus yang lama," kata Ronny di DPP PDIP, Minggu (1/12).

Ronny menduga pemanggilan terhadap Connie Bakrie terhadap kasus lama

tidak lepas dari sikap politiknya saat ini, terutama yang disampaikan saat podcast Akbar Faizal Uncensored.

"Tentunya kami menduga ini korelasinya sama ketika menyampaikan kritik terhadap situasi pilkada tahun ini dan kemudian tiba-tiba ada panggilan," jelas Ronny.

Ronny memastikan Tim Hukum PDIP akan mendampingi Connie apabila dipanggil ke Polda Metro Jaya. PDIP menduga pemanggilan ini sebagai bentuk kriminalisasi.

"Iya tentunya kami dari partai melihat. Bahwa kami menduga ini bagian dari kriminalisasi, sehingga kami perlu untuk mendampingi," katanya.

Pada Maret lalu, Connie dilaporkan sejumlah pihak ke

Polda Metro Jaya buntut pernyataannya terkait polisi mempunyai akses terhadap Sirekap, Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah sebuah aplikasi yang menampilkan agregat perhitungan suara Pemilu 2024 dari seluruh TPS.

Total ada dua laporan yang diterima Polda Metro Jaya pada 20 Maret. Kedua laporan itu masing-masing terdaftar dengan nomor LP/B/1585/III/2024/SPKT/PMJ, tanggal 20 Maret 2024 dan LP/B/1586/III/2024/SPKT/PMJ, tanggal 20 Maret 2024.

Connie kemudian membuat klarifikasinya itu lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Connie menyebut mantan Wakapolri

Komjen Oegroseno sempat memberikan pernyataan terkait pernyataan Pilpres 2024 dalam sebuah pertemuan bukber.

"Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa 'Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres2'," kata Connie dalam unggahannya.

Connie pun menyatakan dirinya telah salah memahami pernyataan yang disampaikan Oegroseno itu dan meminta maaf akan hal tersebut.

dihubungi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak terkait pemanggilan tersebut, namun belum mendapat respon. (hadi)

## Pakar Kritik Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Ngawur dan Mundur

SEMARANG- Pakar hukum tata negara hingga pemerhati kebijakan publik mengkritisi usulan menaruh Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Gagasan itu dianggap menabrak aturan tata negara yang berlaku saat ini.

Pakar Hukum Tata Negara M. Junaidi menilai usulan untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri sangatlah tidak pas. Sebab, Kemendagri lebih cenderung mengurus hal-hal terkait penyelenggaraan pemerintahan di dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah (pemd).

Karena itu, ia menilai jika Polri ditarik ke bawah Kemendagri maka akan nanti terjadi tumpang tindih kewenangan hingga kontrol oleh presiden tak akan maksimal. Belum lagi, tugas Kemendagri yang berjabun akan semakin kompleks dan terbebani jika ditambah pula dengan mengurus Polri.

"Ngawur ini. Kita harusnya paham jika sistem penyelenggaraan pemerintahan kita lebih cenderung ke presidensial, maka menurut saya akan jadi salah kaprah atau bisa overlapping. Karena kalau ditarik ke Kemendagri, kontrol dari presiden malah tidak akan maksimal," ujarnya di Semarang, Minggu (1/12).

Lebih lanjut, Junaidi mengatakan kedudukan Polri di bawah Presiden langsung tak lepas dari sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia. Di sistem ini, presiden punya kekuasaan tertinggi dalam konteks pertahanan dan keamanan berdasarkan UUD 1945.

"Dilihat fungsi Polri sebagai penegak hukum, maka kedudukan Polri juga sama dengan Kejaksaan dan KPK yang berada pada kedudukan di bawah presiden langsung", jelas Junaidi.

Soal kritik yang menye-

but Polri jadi alat politik penguasa dan tidak netral dalam konstelasi politik, Junaidi menyarankan lebih baik diubah sistem kepemimpinan di Polri. Polri yang saat ini dipimpin Kapolri, diubah menjadi dipimpin beberapa komisioner. Alhasil, keputusan yang diambil nantinya bersifat kolektif kolegial.

"Polri bisa diubah bukan dipimpin oleh seorang Kapolri, tapi pimpinannya adalah komisioner-komisioner. Kepemimpinan oleh para komisioner maka ketika membuat keputusan dapat dilakukan secara kolektif kolegial, yang artinya bersama-sama. Nah konsep bersama-sama ini akan memperkuat pertimbangan putusan yang dibuat oleh Polri dalam rangka penegakan hukum yang kemudian dilaksanakan di NKRI," ucapnya.

Kritik terhadap gagasan Polri ditarik di bawah kendali Kemendagri juga disampaikan Koordinator Lembaga Kebijakan Publik dan Hukum Omah Publik Nanang Setyono. Ia menilai wacana itu bernuansa politis sesaat imbas dinamika Pilpres dan Pilkada.

"Mereka yang berteriak ini karena kalah dalam Pilpres dan Pilkada, terus melontarkan isu, tuduhan, katanya Polri yang disebut Partai Coklat bergerak masif menggalang dukungan untuk calon tertentu yang ditunjuk penguasa," kata Nanang.

Nanang menyebut bila Polri di bawah koordinasi Kemendagri atau TNI maka akan menunjukkan kemunduran pola pikir. Sebab, keluarnya Polri dari TNI, yang kemudian di bawah koordinasi presiden langsung adalah hasil reformasi.

"Saya bingung ini pola pikirnya kok dibalik-balik. Dulu Polri di bawah TNI, terus ditarik langsung di bawah presiden, ini karena lahir dari Reformasi.

Ini kok diinginkan kembali lagi di bawah TNI atau Kemendagri, malah pemikiran yang mundur," imbuhnya.

Ia mengimbau pihak-pihak yang menuding Polri berpihak dalam politik praktis agar bisa membuktikan klaim tersebut supaya bisa menghukum mereka yang melanggar netralitas, bukan malah menghukum satu institusi. "Silakan dibuktikan, kemudian memberi hukuman kepada siapa yang terbukti tidak netral. Bukan menghukum institusi Polri dengan merubah nomenklatur kelembagaannya yang menurut saya bisa melemahkan peran dan profesionalismenya," pungkasnya.

Usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) dikutip Detikcom.

Ia menilai sebaiknya Polri fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota Komisi III DPR itu. (\*)

## Pemerintah Gagalkan Pemberangkatan Ilegal 17 TKI ke Malaysia

JAKARTA - Tim F1QR Lanal Dumai menggagalkan pemberangkatan 17 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 24 warga negara asing (WNA) asal Bangladesh nonprosedural atau ilegal yang hendak berangkat ke Malaysia dari Pesisir Pantai Pelintung, Medang Kampai, Kota Dumai, Riau.

"Perlu kami sampaikan terkait proses kegagalan terhadap 17 PMI nonprosedural dan menangkap dua terduga pelaku," kata Palaksa



Aparat berhasil menggagalkan pemberangkatan 17 TKI dan 24 WNA Bangladesh secara ilegal dari pesisir Kota Dumai, Riau ke Malaysia. Dok. Istimewa

Lanal Dumai Letkol Laut PM Priatno dalam konferensi persnya secara daring, Minggu (1/12).

Priatno menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula pada Jumat tanggal 29 November 2024 didapatkan informasi adanya rencana penyelundupan TKI dan WNA ke Malaysia dari Dumai melalui wilayah Pesisir Pantai Pelintung pada hari Sabtu (30/11).

Kemudian, ia mengatakan pada Sabtu pagi tim bergerak dari Posal Bengkalis menuju Safe House di sekitar lokasi yang diduga akan dijadikan tempat penyelundupan. Tim kemudian tiba di Safe House dilanjutkan mengatur rencana penyerpagan.

Kemudian ia mengatakan tim melakukan penyerpagan mobil

yang sedang menurunkan penumpang yang diduga 10 WNA yang hendak diberangkatkan ilegal pada pukul 16.00 WIB.

Kemudian tim lainnya melanjutkan pendalaman di titik lokasi turannya TKI ilegal dan berhasil mengamankan sebanyak 17 TKI ilegal dan WNA sebanyak 14 orang beserta seorang orang terduga pelaku.

Ia menjelaskan dua orang pelaku telah diserahkan ke Polres Dumai untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Abdul Kadir Karding mengaku salah satu tugas kementerian yang dipimpinnya ini untuk meminimalisir pemberangkatan TKI ilegal.

"Karena ini titik awal

terjadinya eksploitasi terhadap pekerja migran. Bahkan kadang-kadang menuju TPPO," kata Karding.

Karding kemudian mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mewanti-wanti bahwa harus meminimalisir dan menghilangkan eksploitasi terhadap pekerja migran, baik sebelum berangkat bahkan setelah penempatan.

Karding merinci ada 5,4 juta pekerja migran yang berangkat secara ilegal sehingga rentan terhadap eksploitasi.

"Jadi bukan hanya kegagalan [pemberangkatan TKI ilegal]. Tapi target kita membongkar sindikat yang bermain di balik kegiatan nonprosedural ini. Ini jadi komitmen kita," kata dia. (\*)

## Pj Wali Kota Baubau Sambut Raja dan Sultan se Nusantara



Raja dan Sultan se

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si menyambut secara resmi para raja dan Sultan se Nusantara dengan menggelar Gala Dinner di aula kantor Wali Kota Baubau Kamis malam (28/11/2024). Rencananya para Raja dan Sultan yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) ini akan menghadiri pelantikan Sultan Buton atau Laki Wolio di masjid agung keraton Buton dan baruga masjid agung keraton Buton pada Jumat (29/11/2024). Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman memperkenalkan Kota Baubau yang sejak dari sultan pertama dan raja ke-6 sudah berumur

483 tahun yang lalu dan 17 tahun lagi akan memasuki umur 500 tahun. Sehingga saking lamanya banyak cerita nilai-nilai dan itu terjadi di semua wilayah termasuk wilayah para raja dan sultan yang mulia.

Menurut orang nomor satu di Kota Baubau ini, Pemkot Baubau sangat berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan Kota Baubau itu mengadopsi nilai-nilai lokal karena tidak ada negeri yang besar dan sejahtera kalau tidak mempertahankan identitasnya. Hal ini bisa terlihat di semua negara besar yang mempunyai nilai identitasnya dan terus mempertahankan hingga saat ini.

“Dan saya percaya itu di Indonesia semua daerah-daerah yang ada nilai-nilai

kearifan lokalnya dipertahankan dan diadopsi oleh pemerintah daerahnya bisa bertahan beratus-ratus tahun. Jadi itulah yang menjadi komitmen kami di Pemkot Baubau. Akan tetapi, kami juga menyadari bahwa banyak organisasi lembaga adat yang fusi atau mekar bahkan ada juga yang terpecah. Oleh karena itu sebagai anak generasi yang menginginkan nilai adat itu terpelihara sebagai kebanggaan anak generasi selanjutnya maka harus terus berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai itu,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Dr H Muh Rasman sangat menaruh harapan kepada sepeuh Kesultanan Buton dapat terus menjaga dan mempertahankan apa yang mulai hari ini

dibangun karena itu akan menjadi sejarah untuk kebanggaan anak negeri. Dan moment pelantikan Sultan Buton yang dihadiri para raja dan sultan diharapkan bisa berkontribusi dalam kebijakan pemerintah daerah.

Dr H Muh Rasman menyambut baik usulan FSKN yang akan menyelenggarakan Festival Keraton Nusantara di Baubau pada tahun 2025 mendatang. Dan Forum yang akan diselenggarakan di tahun 2025 harus ada deklarasi atau statemen kepada negara dan harus bisa mengeluarkan deklarasi untuk adanya keberpihakan negara terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan budaya. Karena momen itu adalah masa transisi pembangunan 5 atau 20 tahun yang akan datang.(\*)

## Raja dan Sultan se Nusantara Apresiasi Pj Wali Kota Lestarkan Adat dan Budaya

BAUBAU, BP-Raja dan Sultan se Nusantara yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) memberikan apresiasi kepada Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si yang terus berupaya melestarikan adat dan budaya Buton. Apresiasi tersebut disampaikan langsung ketua umum



## Pengambilan Air Pemandian, Awali Prosesi Pelantikan Sultan Buton



Pewartu : Ardi

BAUBAU, BP-Pelantikan Sultan Buton atau Bulilingiana Pau sesuai rencana akan dilaksanakan pada Jumat (29/11/2024) di masjid agung Keraton Buton dan Baruga Keraton Buton. Namun menurut Bonto Ogena Matanaeyo Yayasan Adat dan Budaya Kesultanan Buton (YABKB) Drs H Abdul Wahid, sebelum dilaksanakan pelantikan Sultan Buton atau Laki Wolio maka terlebih dahulu dilaksanakan prosesi adat yakni pengambilan air pemandian yang diambil dari 8 mata air yang disimpan di rumah Bontona Peropa yang berada di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum pada Kamis sore (28/11/2024).

Selanjutnya ungkap Abdul Wahid, air pemandian yang sudah diambil dari rumah Bontona Peropa

tersebut diantar oleh 8 orang laki-laki dan 8 perempuan yang diiringi oleh tarian Galangi bersama Pata Limbona menuju Batu Yi Ganda yang di masjid agung Keraton Buton dan juga berdekatan dengan kuburan Sultan Murhum dan masjid agung Keraton Buton. Kemudian, air pemandian tersebut akan diritualkan dengan pemukulan gendang semalam suntuk sampai Jumat pagi (29/11/2024).

Kemudian pada Jumat pagi (29/11/2024), rombongan pengambil mata air, kembali mendatangi Batu Yi Gandangi untuk mengambil air yang sudah tersimpan pada Kamis sore (28/11/2024) yang kemudian akan diantar langsung ke rumah Laki Wolio atau Sultan Buton yang berada di Kelurahan Kadolomoko

Kecamatan Wolio untuk di laksanakan pemandian baik Laki Wolio maupun permaisuri Sultan.

“Dan sesudah pemandian itu barulah di antar ke masjid Agung Keraton Buton untuk melaksanakan shalat jum'at. Setelah selesai shalat Jum'at maka di adakanlah ritual pemutaran payung di dalam masjid selanjutnya di lanjutkan pemutaran payung di batu upawa dan di lanjutkan dengan acara ritual di baruga, selesai itu selesailah pelantikan,” ungkapnya.

Abdul Wahid berharap prosesi pelantikan Sultan Buton yang dihadiri tamu-tamu dari Kesultanan dan Kerajaan yang ada di nusantara beserta undangan lainnya pada Jumat pagi (29/11/2024) dapat berjalan dengan baik dan sukses.(\*)

FSKN YM Karaeng Turikale VIII Maros Brigjend Pol Dr AA Mapparesa MM, M.Si saat Gala Dinner atau jamuan makan malam yang digelar Pemkot Baubau kepada raja dan Sultan se Nusantara di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata Kamis malam (28/11/2024).

Menurut YM AA Mapparesa, suatu kesadaran atau keikhlasan untuk mempertahankan budaya dan adat serta nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur sudah ditunjukkan Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi dan seluruh jajarannya termasuk kepada seluruh perangkat adat Kesultanan Buton atas upaya melestarikan

adat istiadat dan budaya.

Oleh sebab itu, Ketua FSKN AA Mapparesa juga menyampaikan pesan dari seluruh anggota FSKN kepada Pj Wali Kota Baubau mengingat bahwa pataka untuk Silaturahmi Keraton Nusantara berakhir di Kota Baubau pada tahun 2019 lalu yakni di zaman almarhum Dr H AS Tamrin, MH yang terakhir menyelenggarakan Festival Keraton Masyarakat Adat (FKMA). Sehingga tidak terlalu berlebihan jika diusulkan untuk digelar kembali aktivitas FKMA di Baubau di tahun 2025.

Karena FKMA memberikan kesan yang dalam baik tuan rumah maupun seb-

agai kerabat. Karena itu, janganlah masalah waktu dan biaya menjadi penghalang akan tetapi semangat silaturahmi yang menggerakkan hati untuk dapat datang pada festival keraton nanti.

Pada kesempatan tersebut, YM AA Mapparesa juga memperkenalkan kehadiran perwakilan dari Kerajaan Timor yang kini masuk wilayah Timor Leste. Diakui, sistem pemerintahan memang ada batas wilayah namun kalau pemerintahan adat batasnya ada di hati. Karena itu didalam lembaga adat tidak ada batas wilayah karena semua satu misi yakni pelestarian adat dan budaya. (\*)